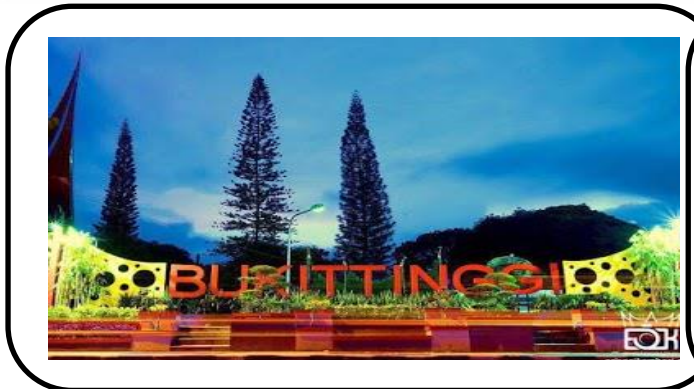
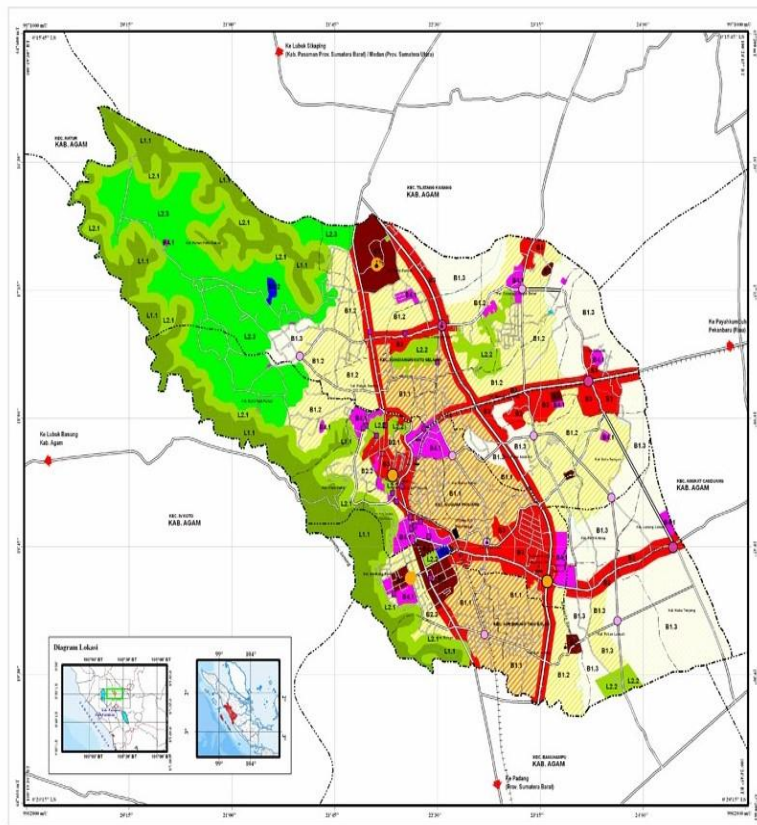




DRAFT LAPORAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2005-2025



Disusun Oleh:
POKJA KLHS PERUBAHAN RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2005-2025

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
2018**

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugrah dan rahmat-Nya sehingga buku Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi 2005-2025 dapat terselesaikan dengan baik. Buku laporan ini diuraikan kedalam 5 (lima) bab, yang meliputi Pendahuluan, Profil Wilayah Kajian, Identifikasi Kebijakan Rencana dan Program (KRP), Pengkajian Pengaruh Kebijakan Rencana dan/atau Program, serta Perumusan Alternatif Dan Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan Rencana dan/atau Program.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi 2005-2025. Terintegrasinya aspek lingkungan hidup ditujukan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui kebijakan rencana dan/atau program Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 dan meminimalisir konflik dalam pelaksanaan kebijakan rencana dan/atau program Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 pada masa yang akan datang.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan buku Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 ini.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR PETA	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Tujuan dan Sasaran	I-2
1.3. Kegiatan dan Metodologi Penyusunan KLHS	I-2
1.4. Hambatan dan Kunci Keberhasilan	I-6
1.5. Sistematika Pelaporan	I-7
BAB II PROFIL WILAYAH KAJIAN	
2.1. Administratif	II-1
2.2. Kondisi Fisik	II-3
2.3. Penggunaan Lahan	II-15
2.4. Keanekaragaman Hayati	II-17
2.5. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	II-19
2.6. Potensi Sumber Daya Alam	II-24
2.7. Potensi Ekonomi Wilayah	II-25
BAB III IDENTIFIKASI KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM (KRP)	
3.1. Visi	III-1
3.2. Misi	III-3
3.3. Arah Kebijakan	III-3
3.4. Sasaran Pokok	III-5
3.5. Penapisan Kebijakan, Rencana, Program (KRP)	III-10
BAB IV PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM	
4.1. Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kota Bukittinggi	IV-1
4.2. Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, Program (KRP).....	IV-4
4.3. Analisis Pengaruh Muatan kebijakan, Rencana, Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	IV-7
BAB V PERUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM	
5.1. Perumusan Alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program Rancangan Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi.....	V-1
5.2. Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analitis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Sebagai Daerah yang pada saat ini sedang menyusun Rancangan Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi wajib melaksanakan KLHS RPJPD. KLHS ini dilakukan pada tahap awal dari proses penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan apabila Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan. Menurut Asdak (2012), KLHS tidak mengkaji dampak sebuah proyek, melainkan mengkaji dampak sebuah (KRP). Hasil dari

kajian ini tentunya bersifat strategik, karena akan menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan KRP yang tertuang dalam Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025. Dengan kata lain, dengan adanya implementasi KLHS ini diharapkan permasalahan lingkungan yang ada dapat di atasi dan pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Bukittinggi.

KLHS ini disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RPJPD agar perencanaan pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS menurut UU No. 32/2009 Pasal 15 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah diberi mandat/kewajiban untuk melakukan KLHS di dalam proses perencanaan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) lainnya, yang memiliki potensi dampak/risiko lingkungan. KLHS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah Kota Bukittinggi melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi. Idealnya, produk akhir KLHS, yaitu rekomendasi KLHS diintegrasikan ke dalam draft rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis menyatakan pada pasal 5, penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan meliputi : (1)

pembuatan dan pelaksanaan KLHS, (2) penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan (3) validasi KLHS.

Kemudian untuk pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme :

(1) pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup; (2) perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan (3) penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Kota Bukittinggi membentuk Kelompok Kerja KLHS dengan SK Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-159-2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, Susunan Kelompok Kerja KLHS diketuai oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, selanjutnya Pokja KLHS terdiri dari 23 anggota yang berasal dari SKPD terkait dan tenaga ahli (SK Tim Penyusun KLHS terlampir).

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi 2005-2025 adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi ke dalam Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi.

Sasaran penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi adalah:

- a. Tersusunnya perancangan tahapan proses KLHS atau memahami konteks (termasuk proses dan prosedur) penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) dan peluang integrasi KLHS ke dalam dokumen Perubahan RPJPD.
- b. Tersusunnya kajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan

Program (KRP) RPJPD Kota Bukittinggi berdasarkan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan.

- c. Tersusunnya perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi 2005-2025.
- d. Tersusunnya rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) RPJPD Kota Bukittinggi dan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam dokumen RPJPD.
- e. Tersusunnya dokumentasi KLHS RPJPD Kota Bukittinggi yang dapat diakses publik.

1.3 Kegiatan dan Metodologi Penyusunan KLHS

Menurut PP No. 46 Tahun 2016 pasal 6 menyatakan bahwa tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme :

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II PROFIL WILAYAH KAJIAN

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi Wilayah

Secara geografis Kota Bukittinggi terletak pada bagian tengah Propinsi Sumatera Barat 100°21 – 100°25 Bujur Timur dan 00°76 – 00°19 Lintang Selatan. Luas wilayah lebih kurang 25,23 Km² yang terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian 756 –960 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan yang sangat bervariasi dan dapat dibagi menjadi topografi yang relatif datar, berbukit-bukit dan terjal. Wilayah yang berada di kawasan Ngarai Sianok (15,38%), sementara daerah perbukitan (9,79%) berada disekitar ngarai, kawasan Gulai Bancah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan yang memiliki kemiringan relatif datar (74,83%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Adapun proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi
Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60

4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber: Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Berdasarkan Luas wilayah, Kota Bukittinggi dapat dikategorikan sebagai Kota Kecil, dan dari segi jumlah penduduk merupakan kategori Kota Sedang, sehingga dapat dikatakan cukup padat untuk sebuah kota kecil. Kota Bukittinggi tidak mempunyai daerah Pedalaman, Terpencil, Pesisir, Pegunungan dan Kepulauan. Posisi Kota Bukittinggi sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang dan Kota Padang, serta Kota Bukittinggi - Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping dan Kota Lubuk Basung. Disamping itu Kota Bukittinggi juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Kondisi demikian menyebabkan Kota Bukittinggi yang mempunyai hawa yang sejuk berpotensi sangat besar sebagai daerah wisata dan peristirahatan utama dalam Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah, Bukittinggi memiliki wilayah administratif yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan, dengan luas masing-masing wilayah sebagai berikut :

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km² (683,10 Ha) atau 27,07 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 7 kelurahan.

2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km² (1.215,60 Ha) atau 48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 9 kelurahan.
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km² (625,20 Ha) atau 24,77 % dari total luas Kota Bukittinggi yang meliputi 8 kelurahan.

Disamping luas wilayah relatif kecil, daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pemukiman juga terbatas karena adanya perbukitan dan jurang (ngarai) yang cukup dalam. Sementara itu perkembangan kota dan penambahan penduduk dalam beberapa tahun terakhir ternyata cukup pesat. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk Kota Bukittinggi termasuk yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Jalan keluar untuk pemecahan masalah luas daerah ini adalah dengan melakukan perluasan kota. Namun demikian, sampai saat ini upaya tersebut masih terkendala karena belum terlaksananya serah terima antara Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999.

Dari aspek lingkungan hidup, Kota Bukittinggi ditandai dengan semakin padatnya jumlah penduduk. Kondisi ini berdampak kepada daya dukung kota, sehingga perlu disesuaikan melalui upaya rekayasa lingkungan, baik perumahan, pasar, maupun fasilitas umum. Termasuk diantaranya kualitas udara, saluran pembuangan sampah dan tingkah laku masyarakat dalam memelihara lingkungan. Sejalan dengan hal itu perlu pula dilakukan penataan yang terkait yang terkait dengan jalur lalu lintas guna mengurangi kemacetan, baik lalu lintas kendaraan bermotor maupun kendaraan yang ditarik dengan hewan, roda dua, kendaraan roda empat kecil maupun besar. Upaya untuk mengatasi persoalan sampah adalah sangat sinkron bilamana

dikaitkan dengan kebutuhan warga untuk hidup sehat dan menikmati indahnnya kota.

Pengembangan pola ruang Kota Bukittinggi didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu :

- a) Struktur ruang yang dikembangkan;
- b) Evaluasi kesesuaian dan daya dukung lahan;
- c) Kondisi penggunaan lahan saat ini serta kecenderungan perkembangannya.

Alokasi rencana pola ruang di Kota Bukittinggi secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2.
Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi

POLA RUANG	ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)	%
Semua Kawasan	646,89	572,054	1.298,128	2.523,902	100%
Kawasan Lindung	89,974	146,588	320,706	557,268	22%
1. Kawasan Lindung Setempat	56,687	77,103	195,654	329,444	13%
1.1 Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444	13%
2. Ruang Terbuka Hijau	33,287	69,485	125,052	227,824	9%
2.1 RTH Taman Kota	3,279	20,725	48,030	72,034	3%
Hutan Kota	1,047	14,197	26,837	42,081	2%
Taman Kota	2,232	6,528	21,193	29,953	1%
2.2 RTH Fungsi Tertentu	24,063	47,56	86,587	158,21	8%
Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836	4%
Sempadan Sungai	5,032	4,913	15,291	25,236	1%

Taman Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,44	2%
Taman Pemakaman Umum	3.124	6.399	10,177	19.7	1%
2.3 RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,6	1,2	2,37	5,17	0%
Kawasan Budidaya	563,619	417,347	982,068	1.963,032	78%
1. Kawasan Perumahan	297.299	222,869	612,898	1.133,066	45%
1.1 Perumahan Kepadatan Tinggi	110,290	114,778	290,209	515,278	20%
1.2 Perumahan Kepadatan Sedang	174,129	98,025	322,688	594.842	24%
1.3 Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946	1%
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa	40.338	122,266	103,406	266,009	11%
3. Kawasan Perkantoran	6,865	6,938	20.309	34,111	1%
4. Kawasan Pariwisata	0	4,021	0	4,021	0%
5. Kawasan Peruntukan Lainnya	219,117	61,253	245,455	525,825	21%
5.1 Pertanian Lahan Basah	199,802	0	104,423	304,224	12%
5.2 Pertanian Lahan Kering	0	21.714	106,214	127,928	5%
5.3 Sarana Pelayanan Umum	17,655	39,469	32,215	89,339	4%
5.4 Pertahanan dan Keamanan	1,660	0,070	2,610	4,340	0%

Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Ada dua penggolongan terhadap pola ruang yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, luas kawasan lindung 22% dan luas kawasan budidaya 78% dari luas wilayah Kota Bukittinggi. Kawasan lindung di Kota Bukittinggi terdiri dari kawasan lindung setempat dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pengembangan kawasan budidaya Kota Bukittinggi pada dasarnya bergantung pada arahan kepadatan Kota Bukittinggi, dimana arahan kepadatan tersebut ditetapkan sebagai kawasan kepadatan tinggi, kawasan kepadatan sedang serta kawasan kepadatan rendah.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Bukittinggi dengan luas 25,23 Km², daerah yang efektif untuk dibangun hanya sekitar 18 Km². Hal ini disebabkan karena kondisi kota yang berbukit dan memiliki jurang atau yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Untuk itu sangat diperlukan kebijakan dalam pengembangan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Ada dua pendekatan terhadap pengembangan potensi wilayah yaitu :

- **Potensi Lansekap Kota**

Kondisi topografi yang berbukit dapat memberi warna bagi pengembangan Kota Bukittinggi kedepan, yaitu potensi pemandangan lansekap kota. Kawasan perbukitan di Kota Bukittinggi memiliki potensi pandang ke arah perkotaan yang memiliki ketinggian yang lebih rendah. Keberadaan bukit-bukit tersebut dapat menjadi titik-titik pengembangan yang memberikan nilai *view* yang terbaik di Kota Bukittinggi.

- **Potensi Pengembangan Ekonomi**

- Kepadatan Penduduk

Ada perbedaan jumlah penduduk Kota Bukittinggi antara siang hari dan malam hari, dimana penduduk siang hari 2-3 kali lebih banyak dari pada malam hari. Hal ini dikarenakan Kota Bukittinggi merupakan destinasi perjalanan dan perdagangan bagi wilayah-wilayah *hinterland* Kota Bukittinggi yang pada umumnya adalah wilayah administrasi Kabupaten Agam yang sangat berpengaruh terhadap potensi pengembangan ekonomi Kota Bukittinggi.

- Sosial Budaya Masyarakat

Walaupun sampai saat ini Kota Bukittinggi telah menjadi kawasan urban, namun secara budaya masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini dengan adanya gerakan kembali ke Nagari, hal ini akan berimbas pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan agama akan semakin menguat. Karakteristik tatanan kehidupan masyarakat Kurai Limo Jorong yang menjadi dasar filosofis budaya Kota Bukittinggi.

- Perekonomian Kota

Secara regional, Kota Bukittinggi merupakan pusat ekonomi bagi wilayah *hinterland*-nya, dalam hal ini wilayah Kabupaten Agam. Karakteristik ekonomi Kota Bukittinggi tercermin dari dominasi kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bukittinggi, yang menjadi orientasi bagi wilayah *hinterland*-nya. Dalam hal ini Kota Bukittinggi berperan sebagai pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa bagi wilayah di Kota Bukittinggi itu sendiri maupun wilayah regionalnya.

Dari sisi potensi sumber daya alam, Bukittinggi tidak memiliki potensi galian tambang, mineral, gas bumi, perikanan laut serta hutan yang dapat dieksploitasi sebagai sumber perekonomian kota. Namun Kota Bukittinggi memiliki alam yang indah dan posisi yang sangat strategis, yakni berada pada posisi silang lintas ekonomi Barat-Timur dan Utara-Selatan wilayah regional Sumatera. Kondisi yang demikian menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana. Kawasan rawan bencana longsor berada sepanjang bibir Ngarai Sianok meliputi ketiga kecamatan yang ada seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.3.
Wilayah Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tanah longsor

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
1.	Zona Rawan Tinggi	Belakang Balok Birugo Ladang Cakiah Kubu Tanjung Pakan Labuah Sapiran	Kayu Kubu BCKR Pakan Kurai ATTS Tarok Dipo Benteng	Koto Selayan Garegeh Campago G.Bulek Campago Ipuh Kubu Gulai bancah

Rawan Gempa Bumi				
No	Zona	Kecamatan		
		ABTB	GP	MKS
		Aur Kuning Parit Antang	Pasar Atas Bukit Apit Puhun	Puhun Tembok Manggis Ganting Pulai Anak Air Puhun P.Kabun
Kerawanan Goncangan Tanah				
1.	Zona Rawan rendah	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Sapiran Parit Antang Ladang Cakiah	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Pakan Kurai Bukit Apit Puhun ATTS	Koto Selayan Campago Ipuh Puhun Tembok Puhun Pintu Kabun
2.	Zona Rawan Sedang	Kubu Tanjung Pakan Labuah Aur Kuning Birugo Belakang Balok Sapiran Parit Antang	BCKR Tarok Dipo ATTS BPA Bukit Apit Puhun ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Campago Ipuh Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah
3.	Zona Rawan Tinggi	Birugo Belakang Balok	BCKR Tarok Dipo ATTS Kayu Kubu ATTS	Pulai Anak Air Koto Selayan Garegeh Manggis Ganting Campago Guguk Bulek Puhun Pintu Kabun Kubu Gulai Bancah

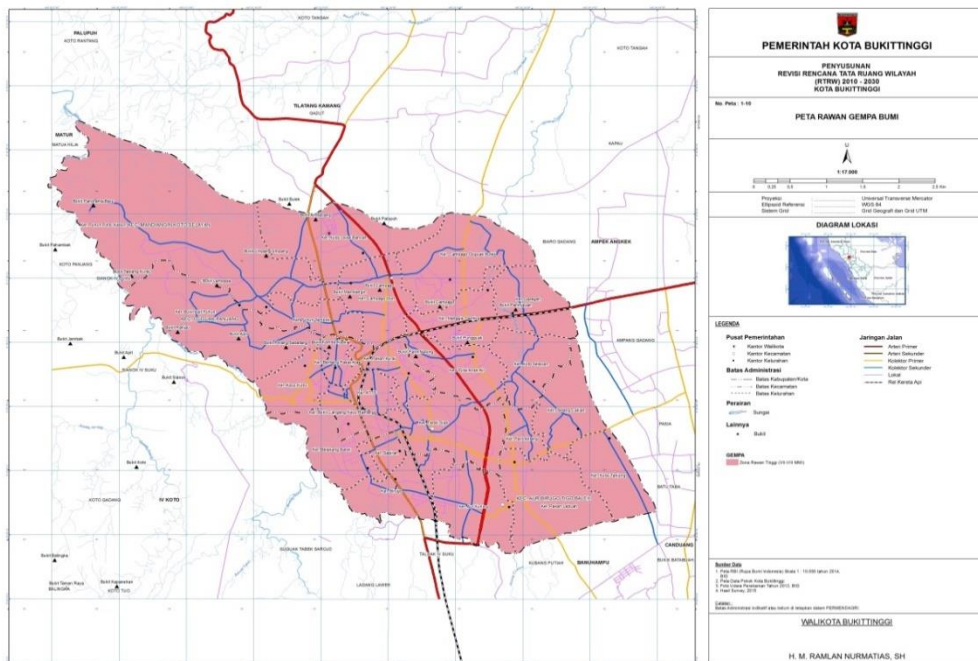
Sumber : Analisa Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiingin Koto Selayan)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh wilayah yang berada dalam Kota Bukittinggi sangat berisiko terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi. Kategorinya mulai dari zona rawan bencana rendah, sedang dan tinggi. Menyikapi hal tersebut, maka Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2017 telah menuangkan kebijakan terhadap penanganan kawasan bencana ini dalam Draf Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 yang menetapkan bahwa sepanjang Kawasan Ngarai Sianok dan sempadan Ngarai Sianok yaitu dari Bibir Ngarai sampai dengan 50 Meter merupakan kawasan rawan bencana dengan zona rawan tinggi.

Gambar 2.1

Peta Kerawanan Gempa Bumi Kota Bukittinggi



Gempa Bumi merupakan pelepasan energi kejut yang merambat sebagai gangguan (*disturbances*) pada material pembentuk bumi. Perambatan gangguan (*propagation of disturbances*) sebagai pola gelombang tekanan (kompresi) tinggi bergonta ganti dengan tekanan rendah melalui masa material di

dalam bumi, sehingga di permukaan bumi timbul getaran menghentak-hentak (*stick-slip*). Respon dari suatu area di permukaan bumi terhadap gempa, terkait ke 4 faktor, yaitu; sifat fisik dari material pembentuk area, kemiringan area, kekuatan gempa bumi dan struktur geologi area (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2007). Kota Bukittinggi, meskipun terletak di luar jalur sesar aktif, namun akan menerima perambatan getaran seismik jika terjadi gempa bumi yang berhiposentrum pada jalur sesar tersebut.

2.1.4 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Penduduk Kota Bukittinggi dapat dianalisis menurut struktur umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Jumlah penduduk usia kerja (25-55) tahun 2016 di Kota Bukittinggi sebanyak 83.055 jiwa (67,73%), dari total jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sedangkan usia sekolah berjumlah 45.908 jiwa (38,102%). Jadi dari uraian di atas bahwa usia penduduk yang lebih menonjol adalah usia produktif yaitu usia 25-55 tahun, artinya penduduk usia produktif relatif besar yang merupakan modal dasar bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang akan mendapat pendidikan dasar dan menengah

(5-10) tahun mendatang akan meningkat sehingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah harus dipersiapkan.

Sebaran penduduk di Kota Bukittinggi terbesar adalah di Kecamatan Mandiangin Kota Selayan, yaitu 40,98% dari seluruh penduduk Kota Bukittinggi, diikuti oleh Kecamatan Guguk Panjang, yaitu 36,75% dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebesar 22,27%.

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Menurut Jenis Kelamin

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2017	61.588	65.216	126.804	1,71
2.	2016	61.163	63.552	124.715	1,71
3.	2015	59.419	63.202	122.621	1,77
4.	2014	58 408	62 083	120 491	1,88
5.	2013	57.261	60.999	118.260	1.88
6.	2012	55.287	59.128	114.415	1,93
7.	2011	54.933	58.636	113.569	1,93

Sumber : Badan Pusat Statistik

Jika dirinci dan dikaji lagi tentang jumlah penduduk sebagaimana terlihat pada tabel diatas, maka dapat dilakukan pemilahan data tersebut tentang kondisi kepadatan penduduk, berdasarkan lokasi dan tempat tinggal. Dengan luas Kota Bukittinggi hanya 25,23 Kilometer persegi (Km²) dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah

126.804 jiwa berarti kepadatan penduduk adalah sejumlah 5.072 jiwa/Km². Ini Artinya disetiap 1 Km² terdapat penduduk sebanyak 5.072 jiwa. Namun sebaran penduduk tersebut tidak merata disetiap wilayah kecamatan.

Untuk melakukan pemerataan sebaran dan kepadatan penduduk terlebih dahulu harus memperhatikan tentang pengaturan kawasan pemukiman. Langkah yang dilakukan antara lain adalah memperhatikan kawasan pemukiman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW). Jika kepadatan penduduk tidak dikendalikan akan berdampak kepada peningkatan masalah sosial, kurangnya keamanan dan ketertiban, kemungkinan terjadi wilayah daerah kumuh, serta meningkatnya tingkat kemiskinan.

Hal lain yang harus dikaji dalam demografi adalah komposisi penduduk yang dikelompokkan menurut tingkat umur. Pada tahun 2017, kelompok peringkat tertinggi dari total jumlah penduduk adalah kelompok umur 20-24 tahun sebanyak 11,05% dari Total Jumlah penduduk, disusul kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 10,91% dan kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 10,43%. Sedangkan kelompok umur lainnya dapat dikatakan kondusif. Banyak hal yang harus disiapkan dalam menghadapi 3 kelompok umur tertinggi dimaksud. Pada usia 0-4 tahun kita harus banyak meningkatkan dan memprioritaskan pada program kegiatan kesehatan ibu, bayi dan anak. Selain itu Pemerintah daerah bersama masyarakat harus menghitung tersedianya PAUD yang berimbang dengan jumlah anak anak usia 0-4 tahun tersebut.

Usia 15-19 tahun adalah usia produktif dan kreatif. Penduduk pada usia ini yang lazim disebut anak anak remaja yang penuh imajinasi untuk memanfaatkan masa remajanya.

Banyak kemungkinan yang akan terjadi dalam usia ini. Bagi para remaja yang produktif dan kreatif maka pemerintah daerah dan masyarakat harus dapat membaca kemana arah kreatifitas mereka dan harus menyediakan sarana dan prasarana mereka dalam mewujudkan kreatifitasnya, sehingga jangan sampai kreatifitas mereka menjadi tidak berkembang dan yang penting dijaga agar mereka tidak berpengaruh pada lingkungan yang negatif. Selain itu, juga harus mengkaji jumlah ruang kelas yang tersedia, baik ditingkat SLTP ataupun SLTA, untuk menampung mereka yang dalam usia sekolah dan dalam usia wajib belajar. Disisi lain Pemerintah daerah juga harus meningkatkan sekolah yang telah memenuhi kreteria Standar Nasional Pendidikan. Rasio jumlah guru dan murid serta upaya untuk meningkatkan prestasi anak agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada usia 20-24 tahun adalah usia dimana penduduk tersebut telah mulai memasuki masa kedewasaan dan telah duduk di perguruan tinggi ataupun telah mulai terjun ke masyarakat untuk kelangsungan hidupnya atau dunia kerja. Pengaruh lingkungan sangat tinggi. Jika anak anak pada usia tersebut tidak dibekali dengan ilmu dan agama yang kuat, maka tentunya kita khawatir akan berpengaruh pada kenakalan bahkan kejahatan, seperti pencandu narkoba, dan lainnya. Untuk itu pada usia ini pemerintah harus menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak yang belum mampu untuk melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi. Memperbanyak kegiatan dan program pelatihan untuk ketenagakerjaan sesuai dengan bakat yang dimiliki. Penyaluran tenaga kerja, melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja. Bagi mereka yang telah mampu membuka usaha dan lapangan kerja sendiri, maka peran Pemerintah daerah adalah menekan jumlah pengangguran dan

melakukan pembinaan kepada mereka salah satunya dengan memberikan bantuan permodalan.

Tabel 2.5
Proporsi Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2017 Menurut
Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Persentase
1	0-4	10.43%
2	5-10	9.60%
3	11-14	8.32%
4	15-19	10.91%
5	20-24	11.05%
6	25-29	8.60%
7	30-34	7.64%
8	35-39	7.20%
9	40-44	6.63%
10	45-49	5.86%
11	50-54	4.79%
12	55-59	4.15%
13	60-64	2.96%
14	65 +	1.88%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017 (Data di olah kembali)

Tingkat mobilitas penduduk daerah sekitarnya ke Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan lokal dan regional ternyata sangat besar. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Agam sehari-harinya berbelanja dan menggunakan fasilitas sosial dan ekonomi Kota Bukittinggi. Karena itu, perkiraan penduduk kota ini pada siang hari meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dihitung secara *dejure*, Migrasi penduduk ke dalam Kota Bukittinggi mengindikasikan kecenderungan meningkat yang antara lain terlihat dari banyaknya bermunculan pedagang kaki lima musiman, meningkatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta kunjungan lain seperti studi banding, seminar/konvensi, serta kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesejahteraan Masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan manusia, Tingkat kesejahteraan masyarakat kota Bukittinggi dapat diukur dengan pendekatan perekonomian dan indeks pembangunan Manusia

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Keadaan ini terlihat dari laju pertumbuhan nilai PDRB dengan harga konstan selama periode 2011-2016 mencapai rata-rata 6,21% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan harga berlaku mencapai Rp 54,1 juta pada tahun 2017.

Nilai pendapatan perkapita tersebut telah berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa tingkat kemakmuran kasar di Kota Bukittinggi sudah lebih tinggi dari rata-rata masyarakat Sumatera Barat.

Bila dilihat pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, ternyata sektor-sektor yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi kota adalah Jasa-Jasa, Lembaga Keuangan dan Perbankan, dan Perdagangan. Sedangkan pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor pertambangan memiliki laju pertumbuhan dibawah rata-rata bahkan menurun (minus).

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

No	Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.37	3.49	2.58	1.8	2017
2	Pertambangan dan Pengalihan	-1.31	-1.71	-0.53	-0.61	2.21
3	Industri Pengolahan	3.61	3.71	3.09	1.17	-0.5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.16	11.13	3.37	10.15	0.78
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.21	0.37	4.63	3.48	5.24
6	F Konstruksi	8.76	4.64	5.89	5.94	3.7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.03	7.44	6.66	6.08	8.67
8	Transportasi dan Pergudangan	6.98	6.54	7.16	7.41	6.08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.08	7.73	7.87	7.4	9.28
10	Informasi dan Komunikasi	5.29	6.56	7.74	7.29	7.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.08	6.67	4.09	8.46	9.14
12	Real Estate	5.42	5.43	5.27	4.92	0.05
13	Jasa Perusahaan	3.93	4.02	4.32	4.23	4.4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.96	1.39	3.91	3.88	5.23
15	Jasa Pendidikan	8.71	6.64	7.42	7.35	4.3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.79	8.12	8.19	8.05	8.7
17	Jasa lainnya	8.65	6.58	6.62	6.03	8.8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6.28	6.2	6.14	6.05	4.07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Pencapaian pertumbuhan ekonomi kota tersebut ditandai dengan berperannya dua sektor utama, yakni sektor jasa dan sektor yang mendukung pariwisata. Berdasarkan data pertumbuhan PDRB tersebut dan dengan memperhatikan kondisi real yang berkembang terdapat potensi strategis yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, diantaranya :

a. Potensi Sektor Perdagangan

Potensi sektor perdagangan muncul didorong oleh Bukittinggi dengan wilayah kota lainnya pada propinsi tetangga, seperti Riau, Jambi dan Sumatera Utara. Potensi sektor perdagangan ini memberikan keuntungan, karena di satu sisi Bukittinggi mampu menghimpun hasil pertanian dan kehutanan, termasuk hasil penggalian yang diproduksi oleh industri yang berasal dari Kabupaten sekelilingnya, khususnya Kabupaten Agam, misalnya produksi dan pengumpulan hasil pertanian, terutama sayur-sayuran dan hasil peternakan.

Sementara itu, arus barang yang masuk dari Jakarta untuk Sumatera Barat didistribusikan juga melalui Kota Bukittinggi, dan kemudian diteruskan ke daerah lainnya di Sumatera Barat. Potensi ekonomi demikian didorong oleh peranan lembaga keuangan, yang pada gilirannya juga memberikan efek ikutan terhadap perkembangan sektor ekonomi lainnya.

Mengingat Bukittinggi merupakan salah satu sentra industri kecil dan perdagangan di Wilayah Sumatera Bagian Tengah, potensi ini perlu dikembangkan melalui pembangunan prasarana dan sarana pasar yang baik dan memenuhi persyaratan. Dengan cara demikian, Bukittinggi akan berpotensi sebagai pusat perdagangan Sumatera untuk produk usaha kecil dan menengah. Posisi yang demikian akan turut pula mendukung pengembangan Bukittinggi sebagai kota wisata. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga kota akan semakin besar.

b. Potensi Sektor Pariwisata

Potensi lainnya yang dimiliki Kota Bukittinggi adalah sebagai daerah tujuan pariwisata di Indonesia. Arus masuk wisatawan mancanegara, maupun domestik telah pula didorong oleh tersedianya keindahan alam dan budaya baik yang berada di Kota Bukittinggi maupun daerah lainnya sebagai penunjang daerah tujuan pariwisata. Potensi alam dan budaya seperti ini telah menguntungkan pihak Bukittinggi dalam bentuk semakin banyaknya wisatawan yang memerlukan kebutuhan selama menikmati keindahan alam dan budaya. Sekalipun demikian, masih banyak diantara potensi yang ada belum optimal digarap, mengingat pengelolaan pariwisata Kota Bukittinggi memerlukan rencana, dan rencana tersebut perlu terintegrasi dengan arah dan kebijakan pariwisata propinsi dan nasional.

Namun demikian, dibalik berbagai potensi dan kemajuan tersebut, ternyata ada beberapa tantangan dan persoalan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat kedepan, diantaranya permasalahan kemiskinan dan pengembangan produk unggulan

kemiskinan di Kota Bukittinggi, masih cukup serius. Data yang tersedia menunjukkan bahwa tahun 2017 dijumpai sekitar 5,35% penduduk miskin. Persoalan yang tersisa adalah bagaimana menyelesaikan penuntasan kemiskinan, dan kemudian memfokuskan kebijakan untuk terciptanya stabilitas ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kecamatan.

Tantangan lainya dibidang ekonomi yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk unggulan dalam menguasai pasar lokal dan merebut pangsa pasar regional maupun internasional. Hal ini penting artinya karena berkaitan dengan kontinuitas produksi, pemasaran produk, efektifitas dan efisiensi manajemen. Komoditi yang dihasilkan tidak hanya oleh warga yang berdomisili di wilayah Bukittinggi, tetapi juga dari wilayah sekitarnya juga sangat besar. Karena Kota Bukittinggi mempunyai luas areal yang sangat terbatas, agar lingkungan yang dimiliki tersebut tetap akomodatif dan kelihatan lebih menarik, maka diperlukan pembenahan, perawatan, penataan, revitalisasi dan pembangunan lingkungan pemukiman dan perumahan, tempat berusaha, dan tempat rekreasi dilengkapi dengan struktur dan fasilitas publik yang serasi dan harmonis dengan lingkungannya. Untuk mengatasi hal diatas, maka diperlukan perencanaan yang matang dan terarah.

Disamping itu, pembenahan ini memerlukan investasi modal yang besar, untuk menjaga konstruksi lingkungan yang ada tetap kokoh dan berkualitas serta menarik dengan menggunakan teknik arsitektur yang baik.

Lingkungan eksternal Bukittinggi mengalami perubahan sesuai dengan porsinya masing-masing. Daerah Asia Timur telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sekali. Pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan sebagian daerah di negara lainnya akan membutuhkan permintaan terhadap produk sekunder dan tersier. Wilayah Timur Pulau Sumatera juga mengalami perubahan yang cukup pesat yang memberikan konsekuensi tersendiri dari posisi Kota Bukittinggi.

Selain dari itu wilayah sentra industri di sebagian Jawa Barat mengalami kejenuhan, yang memungkinkan terjadinya relokasi dari berbagai usaha industri pengolahan dan perdagangan. Sejalan dengan itu berbagai kemajuan kawasan timur pulau Sumatera, seperti Propinsi Riau dan Jambi memberikan arti tersendiri dan perlu dikaitkan dengan proses pembangunan Bukittinggi dengan proses yang terjadi pada lingkungan sekitarnya.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 Tahun ke atas. Perkembangan angka melek huruf Kota Bukittinggi dalam 6 Tahun terakhir menunjukkan efektifitas sistem pendidikan dasar di Kota Bukittinggi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Gambar 2.8

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bukittinggi

Jenis Kelamin	Angka Melek Huruf						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laki - laki	99.82	99.85	99.41	99.44	99.86	99.87	99.87
Perempuan	100	99.17	99.09	99.81	99.91	99.46	99.46

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

2. Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh Penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator Rata-rata lama sekolah dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bukittinggi dalam 6 Tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2017 Rata-rata penduduk Kota Bukittinggi telah bersekolah sampai kelas 2 SMA yakni dengan rata-ratanya adalah 11,3 Tahun, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Gambar 2.10

Perkembangan Rata- rata lama sekolah Kota Bukittinggi

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun)	10.5	10.56	10.62	10.66	10.71	10.79	10.98	11.3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi Sekolah menunjukkan persentase jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah. Untuk kelompok usia 7 – 12 tahun angka partisipasi sekolah di Bukittinggi tergolong tinggi mendekati 100 persen, sementara untuk kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun jika diamati pada periode 2010-2017 tren nya meningkat, namun persentasenya tidak lah setinggi pada kelompok usia 7-12 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada terjadi putus sekolah pada tingkat SMP dan SMA

Tabel 2.12

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah

Kelompok Umur	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%
7 - 12 Tahun	98.65	98.96	98.61	99.69	99.45	100	100	99.46
13 - 15 Tahun	97.43	90.16	93.82	89.63	97.64	99.57	98.26	97.62
16 - 18 Tahun	76.31	80.66	83.89	84.79	90.29	89.96	94.23	87.37

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah

Ketersediaan sekolah, dibandingkan dengan jumlah siswa untuk tingkat SD di Kota Bukittinggi pada periode tahun 2012 sd 2017 tergolong belum memadai, karena idealnya 1 sekolah dasar dapat menampung maksimal 250 orang siswa, sementara kenyataannya pada tahun 2017 ratio sekolah terhadap penduduk usia sekolah Tingkat SD adalah 1 : 318. Demikian pula untuk tingkat SMP dan SMA

Tabel 2.13

Ratio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah

Sekolah	Indikator	Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Murid				
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
SD	Jumlah Murid	15 107	16 407	16 042	19 398	19 398
	Jumlah Sekolah	65	63	59	61	61
	Ratio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1:232	1 : 260	1 : 272	1 : 318	1 : 318
SMP	Jumlah Murid	6 300	6 330	6 280	6 280	6 127
	Jumlah Sekolah	13	14	11	11	12
	Ratio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1 : 485	1 : 452	1 : 571	1 : 571	1 : 511
SMA	Jumlah Murid	5 303	5 450	10 427	10 427	10 194
	Jumlah Sekolah	11	10	17	17	17
	Ratio Jumlah Sekolah Terhadap jumlah Murid	1 : 482	1 : 545	1 : 613	1 : 613	1 : 600

Sumber : Badan Pusat Statistik

4. Ratio Guru Murid

Ratio jumlah Guru terhadap jumlah murid pada tiap tingkatan sekolah baik SD, SMP dan SMA sudah cukup memadai dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2017. Sehingga kebutuhan akan tenaga pendidik bukanlah menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi.

Tabel 2.14

Ratio Jumlah Guru terhadap jumlah murid

Sekolah	Indikator	Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid				
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
SD	Jumlah Murid	15 107	16 407	16 042	19 398	19 398
	Jumlah Guru	902	902	1 153	1 126	1 126
	Ratio Jumlah Guru Terhadap MUrid	1 : 17	1 : 18	1 : 14	1 : 17	1 : 17
SMP	Jumlah Murid	6 300	6 330	6 280	6 280	6 127
	Jumlah Guru	406	406	549	549	534
	Ratio Jumlah Guru Terhadap MUrid	1 : 16	1 : 16	1 : 11	1 : 11	1 : 11
SMA	Jumlah Murid	5 303	5 450	10 427	10 427	10 194
	Jumlah Guru	455	455	763	763	799
	Ratio Jumlah Guru Terhadap MUrid	1 : 12	1 : 12	1 : 14	1 : 14	1 : 13

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Jumlah Nilai Investasi dan Investor

Investasi memiliki peran penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, bahkan untuk jangka panjang investasi akan meningkatkan produktivitas daerah. Akumulasi Investasi PMDN Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2017 mencapai lebih dari 6 triliun Rupiah, sementara Nilai PMA sampai dengan Tahun 2017 lebih dari 20 Juta Dollar Amerika.

Tabel 2.15
Jumlah Investasi PMDN/PMA sampai tahun 2017
Kota Bukittinggi

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (US\$)
Akumulasi Sampai Tahun 2017	12	6.985.859.748.080	6	20.638.200

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi (SIPD)

Sementara dari segi jumlah Investor, seluruhnya ada 18 Perusahaan yang berinvestasi di Kota Bukittinggi yang terdiri atas 12 perusahaan dalam negeri dan 6 Perusahaan Asing.

Tabel 2.16
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Bukittinggi Tahun 2017

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
Akumulasi sampai Tahun 2017	<p>PMDN: (1) PT. Dymens Hotel, (2) PT. Grahamas Citra Wisata, (3) PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), (4) PT. Rajawali Indonesia & Co, (5) PT. Maizar Hasan, (6) PT. Hudaya Firdaus Utama, (7) PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTv), (8) PT. Kendimas Satria Nusantara, (9) PT. Red Planet Indonesia, Tbk, (10) PT. Limela Persada Bukittinggi, (11) Kawali Square, (12) PT. Bunda Empat Pilar.</p> <p>PMA: (1) PT. Jasa Katom (Amerika), (2) PT. Sultan Shaan Wisata Indonesia(tentative)(Malaysia), (3) PT. Lativi Media Karya (Inggris), (4) PT. Sari Melati Kencana, (5) PT. Lebantika Jaya</p>	12	6	18

Sumber: BP2TPM Kota Bukittinggi

2. Daya serap tenaga kerja

Tabel 2.17
Daya Serap Tenaga Kerja

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat PartisiPasi Angkatan Kerja	64.51	67.83	67.33	62.72	65.45	67.59	68.21
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	7.15	7.06	8.11	4.24	2.52	6.04	5.31

Daya serap Tenaga Kerja di Kota Bukittinggi pada periode 2011-2017 masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintahan Daerah kedepan. Karena partisipasi angkatan kerja untuk tahun 2017 saja masih 68,21% hal ini tentunya perlu ditingkatkan melalui intervensi Pemerintah.

Fokus dalam urusan Pemerintahan pilihan lainya adalah Pengembangan pembangunan wilayah perkotaan, sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi, menuntut peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (prasarana) perkotaan sejalan dengan peningkatan aktifitas masyarakat diseluruh kantung daerah pemukiman dan menghubungkan daerah produksi dengan pasar. Apalagi Bukittinggi akan dikembangkan sebagai kota wisata, perdagangan dan jasa, kota pelayanan pendidikan dan kota pelayanan kesehatan serta tempat peristirahatan. Status kondisi ini menyebabkan kota Bukittinggi diramaikan oleh pengunjung siang hari, dan lebih-lebih pada akhir pekan dan hari libur oleh pelajar, dan pengunjung yang akan datang dari daerah sekitarnya dan luar Sumatera Barat. Akibatnya, kebutuhan Kota Bukittinggi akan prasarana dan sarana perkotaan menjadi jauh lebih besar untuk melayani pendatang yang jumlahnya sangat besar.

Dengan mereposisi diri Kota Bukittinggi dalam membangun sarana dan prasarana jalan perlu juga mempertimbangkan pertumbuhan pemanfaatan ruas jalan dan perparkiran, termasuk rute angkutan. Pertimbangan ini diperlukan agar dalam jangka panjang arah penataan kota juga perlu mempertimbangkan aspek tersebut, baik dalam menetapkan kawasan pejalan kaki (pedestrian), kawasan perdagangan, pemukiman dan kawasan resapan air. Proses penghijauan Kota Bukittinggi sudah perlu pula ditempatkan menjadi agenda pembangunan kota pada masa yang akan datang dengan baik. Bahkan dengan melakukan reposisi tersebut, kota Bukittinggi akan memiliki ciri khas yang semakin terlihat dan diminati oleh para wisatawan domestik dan mancanegara.

Dengan terjadinya reformasi kehidupan sosial dan politik sejak tahun 1998 yang lalu, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Demokratisasi yang didasarkan supremasi sipil dan desentralisasi sudah menggantikan sistem pemerintahan sentralisasi yang berlaku selama ini. Keadaan ini terlihat dari semakin besarnya peranan *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* dalam menentukan arah pembangunan nasional. Bahkan Indonesia pada tahun 2004 yang lalu telah berhasil melakukan Pemilihan Presiden (PILPRES) langsung yang merupakan ciri khas dari pemerintahan yang bersifat demokratis yang maju.

Perkembangan pemerintahan pada tingkat nasional tersebut otomatis mempengaruhi pula sistem pemerintahan yang berlaku di daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Disamping itu, sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tanggal 1 Januari 2001 yang lalu, peranan pemerintah daerah menjadi semakin besar. Desentralisasi pembangunan menjadi semakin besar sehingga arah dan kegiatan pembangunan daerah dewasa ini sudah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi semakin penting. Bahkan mulai tahun 2005, 2010 dan 2015 Kota Bukittinggi sudah pula berhasil dengan sukses dan aman melaksanakan *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)* secara langsung.

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang sangat mendasar tersebut, peranan pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan daerah semakin besar. Namun demikian, walaupun otonomi memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah, tetapi prinsip demokrasi mengharuskannya pula untuk mematuhi aturan dan pengawasan dari DPRD dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu, peranan dan kontrol dari masyarakat terhadap arah pembangunan kota juga menjadi sangat menentukan.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya Saing (competitiveness) daerah menjadi isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, Kota, Daerah, Wilayah atau negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Daya saing daerah di Kota Bukittinggi dapat dilihat dari aspek produktivitas total daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

- **Produktivitas Total Daerah**

Salah satu indikator yang dapat mencerminkan produktivitas total daerah adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB sebagai ukuran produktivitas menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB atas dasar Harga Konstant Kota Bukittinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan PDRB atas dasar Harga Konstant Kota Bukittinggi Tahun 2013 s.d. 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi dari tahun 2013 s.d. 2017 adalah pada sektor tersier khususnya Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Transportasi dan Pergudangan.

Tabel 2.4**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)****Tahun 2013 s.d. 2017**

No	Uraian	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	62,85 2.17	65,043. 29	66,721.8 7	67,922.77	69,420. 86
2	Pertambangan dan Penggalian	128.6 7	126.47	125.80	125.03	124.41
3	Industri Pengolahan	345,2 81.39	358,08 2.78	369,139. 12	373,467.8 4	376,39 7.39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31,01 7.94	34,471. 30	35,632.1 1	39,249.16	41,303. 96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,291 .24	-	7,656.82	7,923.28	8,216.4 4
6	F Konstruksi	282,1 04.07	295,20 7.09	312,594. 78	331,162.9 1	359,86 0.60
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,397 ,993. 08	1,501,9 89.36	1,601,97 8.47	1,699,443 .88	1,802,8 31.77
8	Transportasi dan Pergudangan	476,3 07.24	507,44 8.07	543,771. 28	584,086.7 0	638,26 2.16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	188,8 82.26	203,47 9.56	219,500. 54	235,735.7 7	253,44 2.64
10	Informasi dan Komunikasi	326,6 88.81	348,11 7.66	375,058. 61	402,406.5 4	439,18 5.51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260,1 62.30	277,51 5.62	288,870. 24	313,318.3 0	313,46 3.23
12	Real Estate	150,9 36.24	159,13 3.65	167,519. 99	175,761.9 8	183,49 5.50
13	Jasa Perusahaan	30,83 6.42	32,074. 94	33,461.2 6	34,876.67	36,702. 35
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	267,1 42.74	270,86 3.46	281,454. 22	292,374.6 4	304,94 6.75

	Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	209,0 62.17	222,94 0.31	239,477. 97	257,079.6 0	279,44 5.53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	129,3 45.21	139,85 2.95	151,302. 29	163,489.3 4	177,87 6.40
17	Jasa lainnya	158,3 91.63	168,81 3.70	179,989. 16	190,850.4 5	198,62 2.93
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,324 ,423. 59	4,592,4 78.19	4,874,25 4.56	5,169,275 .87	5,483,5 98.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2018

* Sementara

** Sangat Sementara

Perkembangan PDRB atas dasar harga Konstan Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi sebesar 4.324.423,6 juta rupiah, pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga konstan Kota Bukittinggi telah mencapai angka 5.483.598,43 juta rupiah. Sementara itu distribusi PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku pada Tahun 2013 s.d. 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.5

Berdasarkan tabel 2.5, terlihat bahwasanya sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni dengan persentase sebesar 33,87%, dan diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,73%. Kedua sektor ini selalu tumbuh positif jika dilihat perkembangannya dari tahun 2013. Hal ini sesuai dengan salah satu pilar dalam pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa. Dilihat dari sektor primer, kontribusi sektor pertanian tidak mempunyai peranan yang dominan dan setiap tahun selalu mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan sektor

Pertambangan dan Penggalian, karena Kota Bukittinggi tidak memiliki pertambangan, maka sektor ini juga tidak mempunyai kontribusi yang dominan dalam pembentukan PDRB.

Tabel 2.5
Distribusi PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2013 s.d. 2017

No	Uraian	Distribusi PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.49	1.46	1.42	1.37	1.3
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
3	Industri Pengolahan	7.76	7.27	6.77	6.45	6.08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.45	0.52	0.67	0.7	0.72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
6	F Konstruksi	6.59	6.4	6.38	6.22	6.52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	32.23	32.71	33.9	33.98	33.87
8	Transportasi dan Pergudangan	10.78	10.95	10.78	10.61	10.73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.74	4.93	5.41	5.71	5.82
10	Informasi dan Komunikasi	6.61	6.59	5.92	5.9	6.18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.15	6.16	6.09	6.2	5.81
12	Real Estate	3.52	3.51	3.52	3.56	3.47
13	Jasa Perusahaan	0.69	0.67	0.67	0.66	0.65
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.77	6.47	6.16	6.12	6.06
15	Jasa Pendidikan	5.13	5.24	5.27	5.36	5.58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.12	3.11	3.02	3.06	3.24
17	Jasa lainnya	3.83	3.86	3.87	3.93	3.83
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

- Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota. Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan restoran, serta ketersediaan penginapan. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

- Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi dicapai oleh transportasi. Tingkat aksesibilitas diantaranya ditentukan oleh ketersediaan jaringan jalan, dan jumlah alat transportasi.

Letak Kota Bukittinggi yang sangat strategis yaitu merupakan jalur lintas Sumatera dan merupakan perlintasan antar daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah seharusnya memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi sehingga penduduk dan non penduduk yang berada di Kota Bukittinggi memperoleh kemudahan dalam mobilitasnya. Pengaturan tata guna lahan juga akan mempengaruhi tingkat aksesibilitas.

- Penataan wilayah

Penataan Wilayah Kota secara berjenjang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata

Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota itu sendiri.

Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah dimulai dari perencanaan tata ruang wilayah, pemanfaatan wilayah sampai pada pengendalian pemanfaatannya. Penataan wilayah Kota Bukittinggi diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi tahun 2010-2025.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti : kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

- Fasilitas Bank dan Non Bank

Ketersediaan dalam mendukung berjalannya roda perekonomian, fasilitas penunjang seperti keberadaan fasilitas Bank adalah suatu keharusan. Keberadaan bank ini tentunya akan memperlancar transaksi keuangan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini ditambah lagi dengan berbagai fasilitas pelayanan dan kemudahan serta keamanan yang ditawarkan dalam transaksi perbankan. Jumlah perbankan di Kota Bukittinggi sebanyak 19 unit yang terdiri dari Bank Konvensional sebanyak 10 unit, Bank Syariah sebanyak 6 unit, dan BPR Konvensional sebanyak 3 unit.

Tabel 2.3
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya
Kota Bukittinggi

NO	Sektor	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1,	Bank Umum					
1,1,	Konvensional	10	10	10	10	10
1,2,	Syariah	6	6	6	6	6
2,	BPR					
2,1,	Konvensional	3	3	3	3	3
2,2,	Syariah	-	-	-	-	-
JUMLAH		19	19	19	19	19

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

Keberadaan perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi dalam mendukung aspek daya saing daerah cukup penting. Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, jumlah perusahaan asuransi di Kota Bukittinggi tidak mengalami perubahan, masih sebanyak 10 unit, yang terdiri dari perusahaan asuransi kerugian konvensional sebanyak 5 unit dan perusahaan asuransi jiwa konvensional sebanyak 5 unit.

Tabel 2.4
Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kota Bukittinggi

No	Sektor	Jumlah				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
1.2.	Syariah	-	-	-	-	-
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional	5	5	5	5	5
2.2.	Syariah	-	-	-	-	-
JUMLAH		10	10	10	10	10

Sumber: Bagian Perekonomian

- Ketersediaan Restoran/Rumah Makan

Dalam menunjang keberdaan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata perlu ditunjang oleh berbagai fasilitas penunjang, salah satunya adalah keberadaan restoran dan rumah makan. Selain guna menunjang kepariwisataan, hadirnya restoran dan rumah makan akan menambah Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan pajak restoran. Perkembangan jumlah restoran dan rumah makan di Kota Bukittinggi tahun 2011 s.d. 2016 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Restoran / Rumah Makan
Di Kota Bukittinggi

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Usaha rumah makan kelas A	4	4	4	4	4	2
2.	Usaha rumah makan kelas B	2	2	2	2	2	12
3.	Usaha rumah makan kelas C	4	4	5	5	5	4
4.	Usaha rumah makan kelas D	8	8	10	10	10	11
5.	Usaha rumah makan kelas E	-	-				
6.	Jenis Usaha Restoran Non Kelas	34	38	42	42	54	41

Sumber: Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kota Bukittinggi, 2016

- Ketersediaan Penginapan

Fasilitas penting lainnya dalam mendukung kepariwisataan Kota Bukittinggi selain dari keberadaan restoran dan rumah makan adalah penginapan/hotel. Sama halnya dengan keberadaan restoran dan rumah makan, dengan hadirnya banyak penginapan / hotel di Kota Bukittinggi juga akan menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi melalui penerimaan pajak hotel. Kehadiran hotel tentu diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona Pariwisata yang memenuhi kriteria nyaman, bersih, sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan dengan suasana yang mencerminkan ciri khas daerah.

Kota Bukittinggi yang didukung dengan berbagai macam destinasi wisata dan iklim yang sejuk serta ditunjang dengan keamanan dan kenyamanan, tidak saja sebagai daerah wisata tetapi juga sering dijadikan tempat pertemuan baik skala lokal maupun nasional sehingga berdampak pada tingginya tingkat hunian penginapan/hotel.

Jumlah penginapan / hotel di Kota Bukittinggi sebanyak 66 unit yang terdiri dari 18 hotel berbintang dan 48 hotel non bintang. Jenis dan jumlah hotel di Kota Bukittinggi terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kota Bukittinggi

No	Jenis Penginapan / Hotel	2014			2015			2016			2017		
		Jumlah											
		Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang	15	762	1,462	16	898	1,526	17	910	1,513	18	924	1,489
2.	Hotel Non Bintang (Hotel Melati dan penginapan lainnya)	45	831	1,676	47	732	1,370	50	772	1,429	48	779	1.334
3.	Total Jumlah penginapan /Hotel	60	1,593	1,138	63	1,630	2,898	67	1,682	2,942	66	1.703	2.823

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2016

- Iklim Berinvestasi

Dalam pengembangan perekonomian nasional maupun daerah, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (multiplier effects) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan. Dalam menarik investasi ke daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah suatu kewajiban melalui peningkatan keamanan dan ketertiban, kemudahan layanan perizinan, dan sebagainya.

- Keamanan dan Ketertiban

Aspek Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga menarik investasi ke daerah. Menciptakan rasa aman ditengah-tengah masyarakat akan ketertiban seluruh komponen masyarakat akan menghilangkan keengganan para investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya dengan kehadiran investor tersebut akan lebih meningkatkan roda perekonomian di daerah.

- Angka kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Perkembangan angka kriminalitas Kota Bukittinggi pada tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah wilayah hukum Polres Bukittinggi melingkupi Kota Bukittinggi dan Wilayah Agam Bagian Timur, sehingga tindak kriminalitas pada Wilayah Administratif Kota Bukittinggi tergabung juga dengan tindak kriminalitas di sebagian Wilayah Administratif Kabupaten Agam.

Angka kriminalitas Kota Bukittinggi dengan berbagai jenis tindak kriminal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Angka Kriminalitas Kota Bukittinggi
Tahun 2011 s.d. 2015

No	Jenis Kriminal	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kasus Narkoba	23	26	33	25	31
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	0	2	2	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	21	28	19	18	6
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	148	256	240	155	162
5.	Jumlah Kasus Pencurian	159	291	445	215	283
6.	Jumlah Kasus Penipuan	35	51	55	50	40
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	0	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	387	653	794	465	522
9.	Jumlah Penduduk	113,5 47	114,3 93	118,2 60	120,46 9	123,6 08
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	34,08	57,08	67,14	38,60	42,23

Sumber: BPS Kota Bukittinggi

- Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara

terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemudahan perijinan. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya terkait dengan pelayanan perizinan telah mengupayakan pendekatan dan kemudahan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja telah disusun Standar Operating Procedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik dalam Bidang Perizinan. Dengan demikian proses pelayanan perizinan sudah memiliki standar waktu dan biaya pengurusan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8**Lama Proses Perizinan Kota Bukittinggi**

No	Nama Izin	Dokumen Persyaratan	Lama Proses	Biaya Retribusi
1	SITU HO/ Izin Gangguan	Formulir Permohonan KTP IMB/ Kartu Kuning Jika Bangunan Milik Pemerintah Sertifikat Hak Milik/ Surat Perjanjian Hak Sewa/ Surat Pernyataan Pemakaian Tempat Akta Notaris yang telah disahkan pejabat berbadan hukum Dokumen SPPL/UKL/ UPL	12 (dua belas) Hari Kerja	Sesuai Perda
2	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
3	IUI (Izin Usaha Industri)	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
4	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris NPWP	3 (tiga) hari kerja	Gratis
5	TDG (Tanda Daftar Gudang)	Formulir Permohonan KTP Izin Gangguan Gudang	3 (tiga) hari kerja	Gratis
6	TDUWL (Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal)	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris NPWP	5 (lima) hari kerja	Gratis
7	Izin Lembaga Kursus	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris Izin Gangguan Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
8	Izin Operasional	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris Izin Gangguan Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
9	Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris Izin Gangguan Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis
10	Izin Penyelenggaraan PAUD	Formulir Permohonan KTP Akta Notaris Izin Gangguan Rekomendasi	30 (tiga puluh) hari	Gratis

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Bukittinggi

- Sumber Daya Manusia

Secara umum sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh suatu individu. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci sukses dalam pembangunan daerah, dimana sumber daya manusia merupakan subjek dan objek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Ada beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek. Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (*character building*). Ketiga adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil merupakan faktor keunggulan suatu daerah dalam menghadapi persaingan global. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi

muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

- Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan merupakan faktor pendukung perekonomian di instansi pemerintah maupun swasta. Daya saing dan produktivitas tenaga kerja saat ini relative masih rendah, salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah dengan keterampilan dan keahlian yang juga masih minim.

Selain itu kualitas tenaga kerja yang rendah juga dilatarbelakangi oleh faktor kondisi internal tenaga kerja seperti motivasi kerja, pengalaman kerja, keahlian/keterampilan, inisiatif dan kreatifitas.

Salah satu cara yang harus diterapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat pelatihan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk melatih seseorang menjadi manusia terampil, berinisiatif dan berkarakter serta kreatif.

Kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi didasarkan pada jumlah tamatan S1, S2 dan S3 yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Secara data dapat terlihat penduduk Kota Bukittinggi dari kualitas tenaga kerja adalah tamatan S1 dari berbagai disiplin ilmu. Disusul jumlah lulusan S2 namun dengan perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan antara lain, angkatan kerja pada tamatan S1, sangat terbatas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan S2, karena sangat terbatasnya perguruan tinggi yang mempunyai program study S2 di Kota Bukittinggi. Perkembangannya dapat kita lihat pada uraian tabel berikut :

Tabel 2.9**Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kota Bukittinggi**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah lulusan S1	5.605	7.518	6.328	7.443	8.544	10.063
2.	Jumlah lulusan S2/S3	864	429	140	812	978	1.322
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.469	7.947	6.468	8.255	9.522	11.385
5.	Jumlah penduduk	113.903	116.075	118.260	120.491	122.621	124.715
6.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	5,68	6,85	5,47	6,85	7,77	9,13

Dari tabel diatas tergambar bahwa rasio lulusan S1, S2, dan S3 sudah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kota Bukittinggi sudah semakin meningkat dan diharapkan bahwa mereka adalah tenaga-tenaga terampil yang tidak hanya mempunyai ilmu akademis namun juga memiliki keterampilan dan pengalaman kerja.

- Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan yang sudah tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Penduduk muda usia dibawah 15 tahun disebut sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih terganggu pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Penduduk usia 65 tahun ke atas juga dianggap sudah tidak produktif lagi. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif.

Tabel 2.10
Rasio Ketergantungan Kota Bukittinggi
Tahun 2011 s.d. 2017

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	31.7 13	32.7 13	32.7 01	33.1 48	33.5 97	33.9 99	34.3 75
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	5.06 9	5.12 1	5.18 7	5.72 8	5.39 9	5.55 7	5.75 1
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	36.7 82	37.3 52	37.8 88	38.4 26	38.9 96	39.5 56	40.1 26
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	74.9 43	76.5 51	78.1 87	79.8 34	81.4 95	83.0 65	84.5 89
5.	Rasio Ketergantungan	49,0 8	48,7 9	48,4 6	48,1 3	47,8 5	47,6 2	47,4 4

Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2017

Dari tabel di atas terlihat kecenderungan semakin berkurang rasio ketergantungan di Kota Bukittinggi selama tahun 2010-2016. Ini berarti beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan usia yang tidak produktif lagi semakin berkurang dan ini berdampak positif bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.

4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam bidang pembangunan manusia, tingkat kemajuan dapat diukur dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index, HDI*), Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Oleh karena itu, indeks HDI merupakan ukuran tingkat pembangunan lebih baik bila dibandingkan dengan pendapatan perkapita yang bersifat tradisional.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan manusia Kota Bukittinggi dengan Metode terbaru BPS

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup	73.11	73.12	73.12	73.12	73.12	73.52	73.6	73.69
Harapan Lama Sekolah	13.42	13.42	13.87	14.47	14.65	14.92	14.93	14.94
Rata-rata Lama Sekolah	10.5	10.56	10.62	10.66	10.71	10.79	10.98	11.3
Pengeluaran	1160 7	1172 8	1185 6	1200 2	1213 7	1233 0	1247 5	1281 6
IPM	76.12	76.3	76.92	77.67	78.02	78.72	79.11	79.8

Sumber : BPS 2018

Berdasarkan Tabel diatas, HDI Kota Bukittinggi pada tahun 2017 telah mencapai indeks 79,80 sementara kondisi rata-rata untuk Propinsi Sumatera Barat baru mencapai 71,24 dan secara Nasional Indeks pembangunan Manusia Indonesia pada Tahun 2017 adalah 70,8. Sehingga capaian HDI Kota Bukittinggi tersebut telah dalam kondisi yang relatif baik dan perlu dipertahankan.

Hal ini merupakan prestasi yang baik dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kota. Tingkat HDI setinggi itu menurut pengalaman berbagai negara sedang berkembang, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi, dalam arti yang lebih luas.

Persoalan yang masih tersisa adalah bagaimana merubah arah pemerataan pembangunan manusia ke proses pencapaian kualitas manusia untuk segala bidang kehidupan. Kualitas pendidikan menjadi fokus pada masa yang akan datang, agar menghasilkan manusia yang produktif dan mampu bersaing dalam era globalisasi mendatang. Kualitas manusia diharapkan perlu memiliki ciri tersendiri dan memiliki unsur pencapaian intelegensia, pengembangan emosional dan pematapan spritual. Karena itu, unsur Aqidah perlu dijadikan sebagai salah satu unsur pencapaian tujuan pendidikan. Termasuk juga kedalam hal ini kualitas jasa pelayanan pemerintahan dan kondisi ekonomi masyarakat untuk mendorong pencapaiannya.

Hasil dari kualitas pelayanan demikian diharapkan akan menghasilkan daya saing terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat kota. Secara spesifik dengan keadaan pencapaian HDI yang tinggi tersebut didorong pula oleh potensi dimana masyarakat yang lahir dan besar di Kota Bukittinggi memiliki potensi ekonomi dengan sumberdaya manusia.

Potensi wirausahawan muda terlihat dari tumbuhnya kreatifitas yang besar dalam mendorong dan mengembangkan sektor perdagangan baru, baik pengolahan maupun pemasarannya. Potensi tersebut perlu lebih dioptimalkan lagi di masa mendatang.

Secara eksternal, perubahan pola kehidupan masyarakat menjadikan semakin kompleks. Kebutuhan akan kualitas pendidikan masih belum dapat dipenuhi, yaitu khusus menyangkut kualitas pendidikan berbasis Aqidah. Demikian juga dengan perubahan transisi demografi, yang telah mencatat berbagai karakter yang berkembang. Sumatera Barat telah ditempatkan menjadi salah satu daerah yang memiliki penyakit degeneratif yang tinggi pada jenis penyakit stroke. Pada saat bersamaan proses transisi demografi telah menghasilkan pula komposisi penduduk usia tua menjadi meningkat ditambah lagi dengan tingginya angka migrasi penduduk kembali ke Sumatera Barat. Implikasi perubahan eksternal ini bagi pembangunan manusia adalah akan terjadi kebutuhan pelayanan yang besar terhadap peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Dengan dipahami kondisi pembanguan manusia yang berada di Bukittinggi serta potensi yang dimiliki, diperkirakan dalam jangka panjang Kota Bukittinggi perlu merumuskan kembali posisi yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, posisi penting yang dapat dijadikan konsensus adalah bahwa Kota Bukittinggi perlu bersiap diri untuk memasuki era pelayanan internasional dalam bidang pembangunan pendidikan dan pembangunan bidang pelayanan khusus di bidang kesehatan.

BAB III

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM (KRP)

3.1 VISI

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 memuat kondisi umum, visi, misi serta arah pembangunan Kota Bukittinggi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Oleh karena itu substansi materi RPJPD ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD).

Sudah 2 Tahap pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu periode 2006-2010 dan periode 2011-2015. Setiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah itu sendiri memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota Bukittinggi serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah tersebut dijabarkan kembali ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pemantauan dan supervisi realisasi pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Maksud penyusunan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 adalah untuk menyediakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kota Bukittinggi selama 20 (dua puluh) tahun berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi yang dirumuskan dengan kalimat *“Terwujudnya masyarakat adil,sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”*.

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No.19 tahun 2005, Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017.

3.2 MISI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 merupakan dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dasar penyelenggaraan Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi guna menjamin terwujudnya kegiatan pembangunan yang aspiratif, berjalan efektif, efisien, sinergis, koordinatif dan mempunyai sasaran yang jelas untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Untuk mendukung visi tersebut telah ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang, ditetapkan arah pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi untuk periode 2006-2025. Perumusan arah pembangunan jangka panjang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menemukenali persoalan dan fakta yang jelas untuk kemudian dirumuskan alternatif pemecahan dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Memperhatikan kondisi

umum daerah, faktor lingkungan strategis serta visi misi jangka panjang Kota Bukittinggi sebagaimana diuraikan terdahulu, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Bukittinggi periode 2006-2025 yang mana pada saat ini tersisa lebih kurang 7 tahun lagi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan Masyarakat
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya, dan beradab berdasarkan iman dan takwa sebagaimana misi jangka panjang pertama, maka dirumuskan arah kebijakan jangka panjang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat serta penerapan adat dan agama yang dilakukan melalui penguatan peran lembaga adat dan agama di Kota Bukittinggi.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pemantapan sistem pengendalian internal untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan
Program-program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan efektif jika diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai dengan penurunan kesenjangan pendapatan.
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana perkotaan Modern
Penyediaan infrastruktur perkotaan modern menjadi perhatian dan arah kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi untuk

mewujudkan kota yang nyaman, aman serta akomodir terhadap kebutuhan dan perkembangan daerah

6. Penataan Kota dan Pengaturan tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan penataan Kota dan pengaturan tata ruang wilayah menjadi arah kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Bukittinggi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi

7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

8. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya merupakan suatu strategi jangka panjang dalam rangka mempertahankan Kota Bukittinggi sebagai Kota tujuan wisata yang berlandaskan kearifan local kebudayaan daerah Kota Bukittinggi

3.4 SASARAN POKOK

Berdasarkan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebagaimana subbab 5.1 diatas maka dirumuskan sasaran pokok beserta indikator sasaran dan target capaian perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025.

Adapun sasaran pokok tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penerapan pendidikan berkarakter di Kota Bukittinggi.

Untuk mengukur capaian sasaran ini digunakan indikator Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter, yang mana kondisi eksistingnya saat ini penerapan kurikulum pendidikan berkarakter belum dilaksanakan, dan ditargetkan pada akhir periode RPJPD pada Tahun 2025 adalah 10% sekolah telah menerapkan Kurikulum pendidikan berkarakter

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sasaran ini dapat diukur menggunakan 2 Indikator yakni : Opini BPK dan Hasil Penilaian SAKIP. Kondisi Saat ini Opini BPK Untuk Kota Bukittinggi adalah WTP, sedangkan Indeks Sakip Kota Bukittinggi adalah B dan ditargetkan menjadi AA pada Akhir periode RPJPD tahun 2025

3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia yang berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik dengan Metode Terbaru dengan menggunakan 4 komponen yang di ukur yakni Angka Harapan Hidup (Tahun), Angka Melek huruf (%), Rata-rata lama sekolah (tahun) dan Daya beli (Rupiah Pengeluaran Riil per Kapita

4. Meningkatkan Pemerataan ekonomi
Indikator yang digunakan antara lain adalah Indeks gini, Tingkat kemiskinan dan Tingkat pengangguran terbuka
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Indikator yang digunakan adalah Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
6. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian kota Bukittinggi
Indikator yang digunakan adalah Jumlah kunjungan wisatawan, Rata-rata lama tinggal wisatawan dan jumlah event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah
7. Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia
Indikator yang digunakan adalah Pengakuan Unesco terhadap Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia
8. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Modern
Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaannya adalah dengan Penyediaan transportasi Massal, persentase pemenuhan sarana prasarana Publik dan Pemerintahan, dan persentase pemenuhan sarana prasarana Perdagangan
9. Meningkatnya penyelenggaraan penataan Kota dan pengaturan tata ruang wilayah
Indikator yang digunakan adalah Ratio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi
10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaannya adalah Penyediaan air minum layak, persentase kawasan kumuh dan persentase sanitasi layak

Tabel 3.1
Pentahapan Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025

No	Sasaran Pokok Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025	Indikator Sasaran Pokok Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025		Target Capaian				
				RPJMD KE 1 2005-2010	RPJMD KE 2 2010-2015	RPJMD KE 3 2016-2021	RPJMD KE 4 2021-2025	
							Semula	Menjadi
1	Meningkatnya penerapan Pendidikan Karakter di Kota Bukittinggi	1	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter	-	-	-	0	10%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP
		3	Hasil penilaian SAKIP	-	-	A	A	A
3	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	4	IPM	76.12	78.72	79.8	79.8	81.00
4	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	5	Indeks gini	0.41	0.34	0.30	0.30	0.28
		6	Tingkat kemiskinan	5.3	4.56	2.84	2.84	2.0
		7	Tingkat pengangguran terbuka	6.21	5.84	4.93	4.93	4.50
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	8	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	5.4	6.19	6.50	6.50	6.60
6	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam Perekonomian Kota Bukittinggi	9	Jumlah Kunjungan Wisatawan	326.410	460.910	588.245	588.245	654.751
		10	Rata - rata lama tinggal Wisatawan	1 hari	1.5 hari	3 hari	3 hari	4 hari
		11	Jumlah Event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah					
7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia	12	Pengakuan UNESCO	-	-	-	Belum	Diakui
8	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Modern	13	Penyediaan Transportasi Massal	-	-	-	Belum	Tersedia
		14	Persentase pemenuhan Sarana Publik dan Pemerintahan	-	-	-	-	100%
		15	Persentase pemenuhan Sarana Prasarana Perdagangan	-	-	-	-	100%
9	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang wilayah	16	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	-	55%	70%	70%	90%
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Persentase Penyediaan air minum layak	60%	85%	100%	100%	100%
		18	Luas kawasan kumuh	30.60 Hektar	30.60 Hektar	0	0	0
		19	Persentase sanitasi layak	60%	85%	100%	100%	100%

Tabel 3.2

Keterkaitan Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2005-2025

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025	No	Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi 2005-2025	Arah Kebijakan Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025		Sasaran Pokok Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2025		Indikator Sasaran Pokok Pembangunan jangka Panjang Daerah 2005-2026		
terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan	1	Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa	1	Mewujudkan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat	1	Meningkatnya penerapan Pendidikan Karakter di Kota Bukittinggi	1	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Pendidikan berkarakter	
	2	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang professional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	2	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi	2	Opini BPK	
			3	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas	3	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	3	Hasil penilaian SAKIP	
	3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan	4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan Pemerataan pendapatan	4	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	4	5 Indeks gini	
					5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	5	6 Tingkat kemiskinan	
			5	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang berbudaya	6	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam Perekonomian Kota Bukittinggi	6	7 Tingkat pengangguran terbuka	
					7	Mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Dunia	7	8 Tingkat Pertumbuhan ekonomi	
	4	Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera	7	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern	8	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Modern	9	9 Jumlah Kunjungan Wisatawan	
							10	10 Rata - rata lama tinggal Wisatawan	
							11	11 Jumlah Event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah	
	5	Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan	8	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah	9	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang wilayah	12	12 Pengakuan UNESCO	
							9	9 Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	10
								14	14 Persentase pemenuhan Sarana Publik dan Pemerintahan
								15	15 Persentase pemenuhan Sarana Prasarana Perdagangan
								16	16 Ratio Ketaatan terhadap RTRW
								17	17 Persentase Penyediaan air minum layak
								18	18 Persentase kawasan kumuh
								19	19 Persentase sanitasi layak

3.5. Penapisan Kebijakan, Rencana, Program (KRP)

Penapisan dilaksanakan dengan cara uji tabulasi silang muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan kriteria dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kriteria dampak/risiko lingkungan yang digunakan berdasarkan pada ketentuan pada pasal 8 Ayat 2 Permen LHK nomor P69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3. 3

**Penapisan Arah Kebijakan, Rencana, Program (KRP)
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Bukittinggi 2006-2025**

No	Isu Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program	Dampak dan/atau Resiko Lingkungan Hidup							Nilai
		a	b	c	d	e	f	g	
1	Mewujudkan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Perlu
2	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Perlu
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Perlu
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan	+/-	-	-	-	-	-	-	Tidak signifikan
5	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern	+	+	+	+	+	+	+/-	Signifikan
6	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah	+/-	+	+/-	+	+	+	+/-	Signifikan
7	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Perlu
8	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang berbudaya	+/-	-	+/-	+	+	+	+/-	Signifikan

Keterangan :

- a. Perubahan Iklim
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor dan/atau kebakaran dan lahan
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
- f. Peningkatan Jumlah Penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia

Berdasarkan hasil penapisan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi Nomor: Tanggal Juli tahun 2018, dan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan hasil penapisan KRP yang ditanda tangani oleh Kepala Bapelitbang dengan Pokja KLHS, ditetapkan 3 Kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang daerah Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 yang harus dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yakni :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkotaan Modern
2. Penataan dan Pengaturan Tata Ruang Wilayah
3. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya

Sementara 4 arah kebijakan terkategori tidak perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena berdasarkan analisis tidak ditemukan kemungkinan dampak/resiko terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dan 1 arah kebijakan teridentifikasi tidak signifikan berpengaruh terhadap resiko lingkungan hidup sehingga tidak perlu dilakukan Kajian lingkungan hidup Strategis

BAB IV
**PENGAJIAN PENGARUH ARAH KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM**

4.1. Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kota Bukittinggi

Perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bukittinggi dilaksanakan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Strategis Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025, dengan arahan dari Tenaga Ahli penyuisunan KLHS Dr. Ardinis Arbain dari Universitas Andalas. Hasilnya, teridentifikasi 10 isu pembangunan berkelanjutan Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Peningkatan Timbulan Sampah
2. Penurunan Muka Air Tanah
3. Penurunan daya dukung Lahan
4. Pencemaran air
5. Peningkatan suhu udara Kota
6. Berkurangnya Keanekaragaman hayati
7. Kemacetan Lalu lintas
8. Pencemaran Air Tanah
9. Pencemaran Udara
10. Berkurangnya Bukit

Selanjutnya, peserta Forum Konsultasi Publik memberikan masukan dalam pembobotan terhadap isu-isu yang dinilai berpengaruh terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bukittinggi untuk kemudian dijadikan isu prioritas pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Karakteristik wilayah Kota Bukittinggi
2. Tingkat pentingnya potensi dampak dan risiko
3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan muatan kebijakan, Rencana dan Program
5. Muatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
6. Hasil KLHS Rencana tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi

Tabel 4.1

Rekapitulasi Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan Kota Bukittinggi

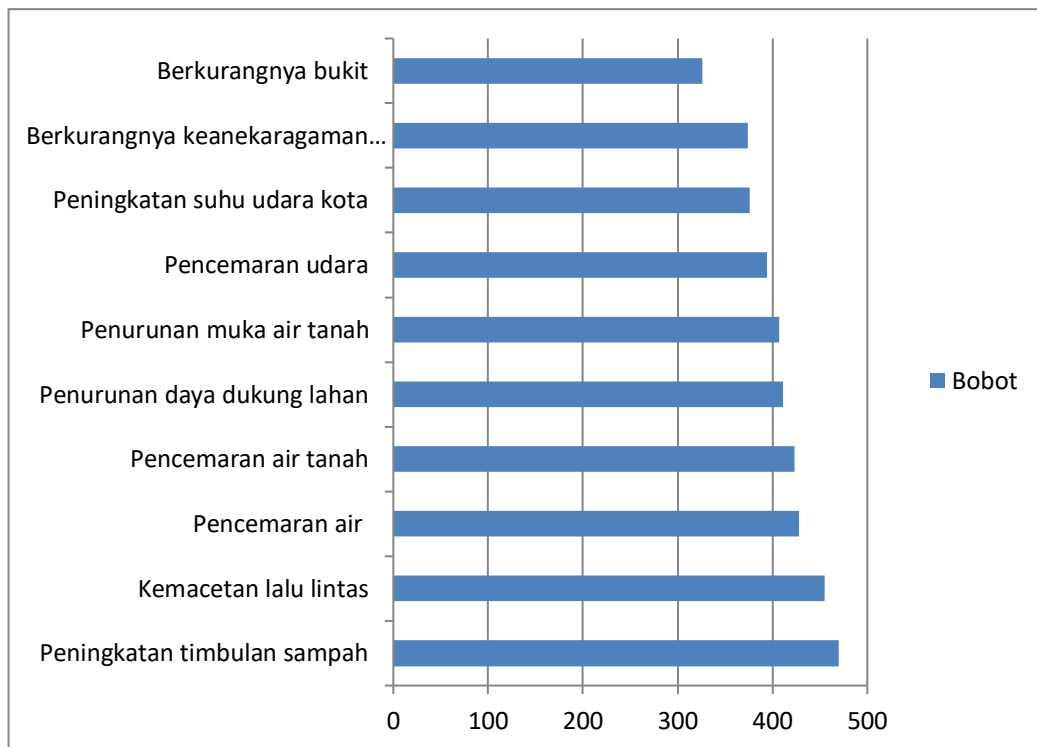
Isu Pembangunan Berkelanjutan	Total Pembobotan																		TOTAL
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
peningkatan timbulan sampah	23	30	29	28	28	26	27	26	30	25	27	24	30	25	17	24	28	23	470
penurunan muka air tanah	21	29	23	26	26	24	25	19	27	18	9	24	25	25	17	19	21	29	407
penurunan daya dukung lahan	27	19	27	25	30	27	25	17	30	15	18	20	26	24	12	20	27	22	411
pencemaran air	27	27	26	27	26	28	27	21	28	21	16	27	20	25	18	18	28	18	428
peningkatan suhu udara kota	20	24	15	19	18	26	24	22	26	15	10	24	30	27	22	14	17	23	376
berkurangnya keanekaragaman hayati	0	36	21	18	20	25	22	16	20	11	21	19	30	25	25	16	25	24	374
kemacetan lalu lintas	27	27	28	23	27	24	30	19	24	26	25	20	28	28	25	21	23	30	455
pencemaran air tanah	25	30	24	24	28	25	25	19	20	20	26	26	30	22	14	22	20	23	423
pencemaran udara	27	22	20	20	30	23	26	21	25	25	10	21	30	24	18	17	14	21	394
berkurangnya bukit	12	25	24	19	15	27	25	14	10	15	8	20	30	20	0	12	26	24	326

Hasil Penilaian/pembobotan yang dilakukan oleh responden dalam penentuan isu strategis pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 4.1, dimana terdapat sebanyak 18 orang responden yang mewakili unsur masyarakat Kota Bukittinggi dalam penilaian terhadap isu pembangunan berkelanjutan.

Penentuan Isu Pembangunan berkelanjutan yang paling strategis dilakukan dengan memperhatikan isu pembangunan dengan bobot tertinggi, sebagaimana ditampilkan dalam grafik pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1

Grafik Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan



Berdasarkan Grafik diatas, 5 Isu pembangunan berkelanjutan dengan bobot paling besar (dianggap paling mengkhawatirkan) sekaligus menjadi isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Kota Bukittinggi adalah:

1. Peningkatan timbulan sampah
2. Kemacetan lalu Lintas, dan
3. Pencemaran air

4. Pencemaran air tanah, dan
5. Penurunan daya dukung Lahan

Jika diamati perbandingan bobot yang diberikan oleh responden terhadap seluruh isu, perbedaannya tidaklah terlalu signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa kekhawatiran masyarakat Kota Bukittinggi tidak hanya berfokus pada 5 isu dengan bobot terbesar saja, namun seluruh isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi bahasan memang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi kedepannya.

5 isu Pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai isu strategis, selanjutnya akan dijadikan sebagai alat untuk menganalisis muatan Kebijakan, Rencana dan Program yang ada pada Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Bukittinggi Tahun 2006-2025.

4.2. Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, Program (KRP)

Identifikasi muatan kebijakan, rencana dan program Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, rencana, program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan hidup

Hasil identifikasi Muatan KRP Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Mewujudkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam kehidupan Masyarakat tidak Memenuhi Kriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan
2. Arah Kebijakan Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas tidak Memenuhi Kriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah,

Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan

3. Arah Kebijakan Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih tidak Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan
4. Arah Kebijakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan tidak Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, dan Pencemaran air tanah, sedangkan untuk isu Penurunan Daya dukung lahan dan Isu Peningkatan timbulan sampah diperkirakan akan memberikan dampak, meskipun demikian dinilai tidak perlu dilakukan kajian muatan karena pengaruhnya tidak signifikan
5. Arah Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan
6. Arah Kebijakan Penataan Kota dan pengaturan Tata Ruang Wilayah Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan
7. Arah Kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup tidak Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan
8. Arah Kebijakan Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya Memenuhi Keriteria untuk dilakukan Kajian Muatan berdasarkan Isu Peningkatan timbulan sampah, Kemacetan lalu lintas, Pencemaran air, Pencemaran air tanah dan Penurunan Daya dukung lahan

Tabel 4.2

Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, Program yang berpotensi
Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

No	Materi Muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan Hidup	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas					Nilai
		Peningkatan Timbulan Sampah	Kemacetan lalu Lintas	Pencemaran Air	Pencemaran air tanah	Penurunan Daya Dukung Lahan	
1	Mewujudkan Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dalam kehidupan masyarakat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Perlu
2	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Perlu
3	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Perlu
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan	Iya	Tidak	Tidak	Tidak	Iya	Tidak Signifikan
5	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Perlu Kajian Muatan
6	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Perlu Kajian Muatan
7	Pemeliharaan dan Peningkatan kualitas lingkungan Hidup	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Perlu
8	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang berbudaya	Iya	Iya	Iya	Iya	Iya	Perlu Kajian Muatan

4.3. Analisis Pengaruh Muatan Kebijakan, Rencana, Program Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dianalisis pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan hidup adalah KRP yang telah teridentifikasi berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap Kondisi Lingkungan hidup.

Berikut Analisis pengaruh muatan KRP terhadap lingkungan hidup :

1. Kebijakan Pengembangan Sarana dan prasarana perkotaan Modern

Perumusan kebijakan pengembangan Sarana dan prasarana perkotaan modern dilatarbelakangi oleh tuntutan perkembangan dan pertumbuhan Kota Bukittinggi yang semakin pesat sehingga kedepannya akan membutuhkan peningkatan akses transportasi massal seperti Pembangunan jalan layang (Fly Over), kereta api cepat (Monorail), jenis angkutan massal lainnya, dan pembangunan terminal dan stasiun, peningkatan kualitas sarana publik dan pemerintahan seperti penambahan dan perbaikan gedung sekolah, rumah sakit, dan gedung-gedung pemerintahan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan seperti revitalisasi Pasar Aur Kuning dan Pasar bawah serta pembangunan mall dan pusat-pusat perbelanjaan.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Terlampauinya Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan jalan layang, kereta api cepat, angkutan massal lainnya, terminal, stasiun, sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah dan pasar.

Sehingga perlu dicarikan alternative kebijakan yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tidak bertentangan dengan isu lingkungan hidup :

2. Dampak dan risiko lingkungan hidup, diperkirakan akan secara langsung berpengaruh. Karena pembangunan sarana dan prasarana perkotaan modern tentunya akan meningkatkan jumlah sampah dan polusi, penurunan muka tanah, dan resiko terhadap lingkungan hidup lainnya.
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem tentunya tidak akan terdampak secara langsung, namun untuk jangka panjang akan mengganggu kinerja layanan jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam akan dipengaruhi secara langsung karena pembangunan sarana prasarana kota yang modern tentunya akan berpotensi mengeksploitasi pemanfaatan sumberdaya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim berpotensi meningkat seiring dengan pembangunan sarana prasarana perkotaan ini, misalnya suhu udara kota semakin panas dan polusi udara
6. Tingkat Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperkirakan akan terganggu diakibatkan oleh banyaknya ruang yang akan terpakai oleh pembangunan sarana prasarana perkotaan modern

2. Kebijakan Pengaturan Tata Ruang Wilayah

Perumusan kebijakan pengaturan tata ruang wilayah ini dilatarbelakangi oleh telah ditetapkannya Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perda Nomor: Tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Bukittinggi, sehingga diperlukan upaya untuk melaksanakan penataan ruang yang diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut.

Kondisi saat ini masih terdapat wilayah-wilayah yang belum sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah, sehingga diperlukan upaya yang sistematis dan terencana dengan baik dalam jangka panjang untuk menata ruang dan wilayah Kota Bukittinggi. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi adalah pembongkaran bangunan, pemindahan pemukiman penduduk, dan pembangunan kawasan pemukiman baru.

Kebijakan penataan kota dan pengaturan tata ruang Wilayah ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Terlampauinya Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperkirakan dapat diminimalisir, namun risiko tetap perlu diwaspadai mengingat terbatasnya luas wilayah Kota Bukittinggi dan kondisi eksisting yang tidak sesuai dengan yang seharusnya
2. Dampak dan risiko lingkungan hidup, diperkirakan akan secara langsung berpengaruh. Karena penataan ruang membawa konsekuensi pemindahan dan pembangunan baru, misalnya pemukiman dan infrastruktur lainnya
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem tidak berpotensi terdampak oleh penataan dan pengaturan ruang wilayah Kota
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam berpotensi untuk menurun dan juga berpeluang untuk semakin efisien jika penataan ruang wilayah berhasil dilakukan sesuai dengan aturan dan kondisi ideal
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim berpotensi meningkat seiring dengan penataan ruang wilayah kota yang akan mengakibatkan terjadinya pemindahan pemukiman penduduk, dan

pembangunan kawasan pemukiman baru. Namun sebaliknya jika penataan ini berjalan sesuai dengan kondisi ideal tentunya tidak akan menimbulkan risiko terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim

6. Tingkat Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperkirakan akan terganggu diakibatkan oleh banyaknya ruang yang akan terpakai oleh pembangunan dan pemindahan pemukiman

3. Kebijakan Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang berbudaya

Perumusan kebijakan Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata yang Berbudaya dilatarbelakangi oleh tuntutan perkembangan dan pertumbuhan Kota Bukittinggi sebagai Kota tujuan Wisata, sehingga konsekuensinya adalah bahwa Kota Bukittinggi harus bisa meningkatkan Jumlah event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Bukittinggi.

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Potensi risiko terlampauinya Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperkirakan dapat dapat terjadi sekaitan dengan peningkatan jumlah wisatawan yang tentunya akan juga meningkatkan permintaan terhadap pembangunan hotel, peningkatan sampah dan potensi terjadinya eksploitasi terhadap sumberdaya alam seperti air, tanah dan polusi udara

2. Dampak dan risiko lingkungan hidup, diperkirakan akan secara langsung berpengaruh. Karena peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang sejalan peningkatan jumlah event pariwisata berbasis kebudayaan berpotensi menyebabkan kemacetan dan peningkatan kebutuhan akan lahan parkir
3. Kinerja layanan atau jasa ekosistem berpotensi secara tidak langsung terdampak oleh kebijakan mewujudkan kota Bukittinggi sebagai Kota wisata.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam berpotensi semakin tidak efisien oleh kebijakan mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai Kota yang berbudaya terkait dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim berpotensi meningkat seiring dengan banyaknya jumlah event dan peningkatan jumlah wisatawan yang datang dapat meningkatkan polusi dan suhu udara
6. Tingkat Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperkirakan akan terganggu diakibatkan oleh meningkatnya event pariwisata yang dilakukan dan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang

Tabel 4.3

Analisis Pengaruh KRP Berdasarkan Muatan Kajian

No	Muatan KRP	Muatan kajian Analisis					
		Kapasitas DDDT untuk Pembangunan	perkiraan Mengenai Dampak dan Resiko LH	Kinerja Layanan/Jasa Ekosistem	Efisiensi Pemanfaatan SDA	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati
1	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan Modern						
	Telaahan :	1	2	3	4	5	6
	Arah kebijakan ini akan berimplikasi pada pencapaian sasaran Peningkatan akses Transportasi Massal, peningkatan kualitas sarana publik dan pemerintahan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Terlampau	Banjir, Penurunan muka tanah dan penurunan kualitas air.	Untuk Jangka Panjang Jasa Ekosistem Tergang	Potensi Pengeksplotasian SDA untuk Pembangunan	Polusi Udara dan Suhu Udara Semakin Panas	Terganggu
2	Pengaturan Tata Ruang Wilayah						
	Telaahan	1	2	3	4	5	6
	Penataan Ruang dan wilayah Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan Perda RTRW Kota Bukittinggi	Terlampau	Dampak Tidak Langsung.	Tidak Terdampak	Tentatif	Tentatif	Terganggu
3	Mewujudkan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Wisata yang berbudaya						
	Telaahan	1	2	3	4	5	6
	Arah kebijakan ini berimplikasi pada pencapaian sasaran meningkatkan Jumlah event Pariwisata yang berbasis kebudayaan daerah, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, dan peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian	Terlampau	Banjir, Penurunan muka tanah dan penurunan kualitas air.	Untuk Jangka Panjang Jasa Ekosistem Tergang	Tentatif	Polusi Udara dan Suhu Udara Semakin Panas	Terganggu

BAB V
PERUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU
PROGRAM

No	KRP Prioritas dan Berdampak	Koponen Alternatif dan Penyempurnaan KRP	Rekomendasi
1	Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan modern		
2	Penataan Kota dan Pengaturan tata ruang Wilayah		
3	Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota Wisata yang berbudaya		

BAB VI

RINGKASAN EKSEKUTIF KLHS PERUBAHAN RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2005-2025

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup

Tahap kajian pengaruh merupakan tahap analisis lanjutan setelah isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan (isu-isu pendek). Kajian pengaruh ini bertujuan untuk memperkirakan dan menghitung besaran dampak dari isu strategis. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 7, dengan tahapan meliputi :

a. Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan

- 1) Mengumpulkan isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan curah pendapat Kelompok Kerja dan telaah literatur.
- 2) Melakukan pemusatan isu dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan: (1) isu lintas sektor; (2) isu lintas wilayah; (3) isu lintas pemangku kepentingan; (4) isu lintas waktu. Selain itu juga dilakukan konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya melakukan konfirmasi dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Melakukan telaah cepat hasil identifikasi pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit (PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1): (1) karakteristik wilayah yang ditelaah dalam bentuk spasial; (2) tingkat pentingnya potensi dampak; dan (3) keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan; (4) keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; (5) muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau; (6) hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya

yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung, Seperti diamatkan dalam PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1. Selanjutnya membuat perkiraan tentang :

tingkat pentingnya potensi dampak, berdasarkan indikasi cakupan wilayah dan frekuensi/intensitas dampak serta keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan hasil telaah sebab-akibatnya. Hasil identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit : (PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 2)

- 1) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- 2) perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- 3) kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- 4) intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
- 5) status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
- 6) ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
- 7) kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- 8) tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
- 9) risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
- 10) ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan dilakukan untuk menentukan isu-isu yang paling strategis yang dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui **konsultasi publik**. Tetapi sebelumnya dibentuk terlebih dahulu Kelompok Kerja KLHS Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang terdiri dari beberapa multi-pemangku kepentingan seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbang, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata Pemuda Olah Raga, Dinas PUPR dan Tenaga Ahli dari Universitas Andalas. Pembentukan POKJA KLHS sebagai bagian dari dokumentasi penyusunan KLHS yang menjadi syarat kriteria validasi.

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengidentifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

b. Merumuskan isu pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi :

- Mengidentifikasi masalah dengan curah pendapat melalui teknik *metaplan*. Curah pendapat dimulai dengan menemukan isu/masalah dari tiap anggota. Dalam curah pendapat konsultan bertindak sebagai fasilitator dan POKJA KLHS sebagai narasumber. Identifikasi masalah ini menghasilkan daftar panjang isu yang kemudian dilakukan pemusatan isu dengan melihat kesamaan substansi dan/atau menelaah sebab-akibat dengan memperhatikan: (1) isu lintas sektor; (2) isu lintas wilayah; (3) isu lintas pemangku kepentingan; (4) isu lintas waktu. Setelah itu dilakukan telaah cepat hasil identifikasi pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit seperti yang diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2016 pasal 9 ayat 1. Hasilnya kemudian dikonsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk pengayaan dan penajaman isu pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan isu prioritas pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi sebagai berikut :
- Peningkatan Timbulan Sampah
- Penurunan Muka Air Tanah
- Penurunan daya dukung Lahan
- Pencemaran air
- Peningkatan suhu udara Kota
- Berkurangnya Keanekaragaman hayati
- Kemacetan Lalu lintas
- Pencemaran Air Tanah
- Pencemaran Udara
- Berkurangnya Bukit

c. Mengidentifikasi isu-isu terkait, faktor pendorong, lokasi, kebutuhan data dan informasi (jenis data dan sumber data) terkait isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi

Kemudian setelah tahapan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi dilanjutkan proses pelingkupan, yaitu menyusun baseline data dari setiap isu prioritas berdasarkan data dan informasi yang sudah didapatkan dari tim POKJA KLHS.

d. Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup

Tujuan : untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan identifikasi materi muatan KRP KLHS RPJPD Kota Bukittinggi dilakukan oleh Pokja KLHS yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan diidentifikasi juga isu prioritas apa saja yang akan terdampak dari adanya kebijakan tersebut. **Terdapat 3 (Tiga) arah kebijakan** di dalam RPJPD Kota Bukittinggi yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang dianalisis yaitu :

- Konsep Rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam penelaahan pengaruh materi muatan yang berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara iteratif atau dilakukan secara berulang mengikuti tahapan perkembangan proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk mengoreksi informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- Seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berlaku yang akan dievaluasi

e. Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan

Analisis pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dari hasil konsultasi publik (PP No. 46 Tahun 2016 pasal 11 ayat 2)

Hasil analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program paling sedikit memuat kajian : (PP No. 46 Tahun 2016 pasal 13)

- Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Kemudian dari hasil analisis materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program akan **menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.**

2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Dalam merumuskan alternatif penyempurnaan KRP melibatkan para pemangku kepentingan melalui proses konsultasi publik seperti yang tertuang dalam PP No. 46 tahun 2016, Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program berupa :

- a. perubahan tujuan atau target;
- b. perubahan strategi pencapaian target;
- c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- f. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- h. Perumusan alternative penyempurnaan KRP dilakukan.

Kemudian hasil perumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program dijadikan **dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.**

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Tahap akhir dalam penyusunan KLHS adalah dengan menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang memuat:

- a. Materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan/atau
- b. Informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

1.2 Hambatan dan Kunci Keberhasilan

A. Hambatan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat beberapa tantangan/hambatan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS RPJPD Kota Bukittinggi, sebagai berikut :

- 1) Ketidaklengkapan data SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah) di Kota Bukittinggi yang digunakan untuk baseline data
- 2) Kurangnya keterlibatan peranan Pokja Tim Teknis KLHS Kota Bukittinggi dalam rapat koordinasi Kajian Dampak Rancangan RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 terhadap KLHS sehingga pengidentifikasian dampak kurang optimal karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah stakeholder OPD di Kota Bukittinggi

B. Kunci Keberhasilan

Dalam proses KLHS dari tahap awal hingga akhir, terdapat kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS adalah **partisipasi masyarakat**. Proses partisipasi, negosiasi, dan kolaborasi masyarakat dalam penyusunan KLHS sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat akan mendorong terkumpulnya informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai keadaan dan permasalahan wilayahnya yang pada akhirnya berguna untuk merumuskan agenda tindak lanjutnya. **Salah satu peranan partisipasi masyarakat** adalah saat identifikasi dan perumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan serta saat pengkajian dampak isu strategis.

Partisipasi dan konsultasi masyarakat dalam KLHS memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- 1) Membuka kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
- 2) Membantu penyetaraan posisi setiap pihak yang berkepentingan, agar proses pengambilan keputusan tidak mudah di dominasi satu kalangan tertentu, dan tidak serta merta melupakan kalangan yang marjinal.
- 3) Meningkatkan legitimasi KRP di mata masyarakat, sekaligus memastikan komitmen semua pihak dalam melaksanakan dan

menaati muatan-muatan aturannya.

Sasaran KLHS yang bisa tercapai dengan baik apabila proses persiapan partisipasi dilaksanakan dengan seksama, dan pelaksanaan konsultasi dan pelibatan masyarakatnya sendiri diselenggarakan dengan memperhatikan semua kaidah-kaidah partisipasi yang berlaku. Tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam KLHS sangat bervariasi tergantung pada cakupan KLHS-nya. Untuk KLHS RPJPD yang cakupannya dalam skala kota akan melibatkan partisipasi komunitas setempat. Hal ini disebabkan cakupan muatan KRP tersebut bersifat operasional dan bersinggungan langsung dengan kegiatan masyarakat.

1.3 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan laporan pelaksanaan KLHS Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, tujuan KLHS, lingkup kegiatan pelaksanaan KLHS, kendala-kendala dalam pelaksanaan KLHS dan sistematika penulisan laporan.

Bab II : PROFIL WILAYAH KAJIAN

Bab ini membahas tentang Gambaran Umum Kota Bukittinggi

BAB III : IDENTIFIKASI KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM

Bab ini membahas tentang Kebijakan, Rencana dan Program yang akan dikaji dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup

BAB IV : PENGKAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ ATAU PROGRAM

Menjelaskan hasil dari pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang dilakukan :

- 4.1. Penentuan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan
- 4.2. Pengkajian dan Analisis Dampak/Risiko Lingkungan

**BAB V : PERUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU
PROGRAM**

5.1 Perumusan Alternatif Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rancangan Perubahan RPJPD Kota Bukittinggi.

5.2 Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Rancangan RPJPD Kota Bukittinggi